

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA  
HATETABAKO KECAMATAN WASILE TENGAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Allen Ngongare  
Welson.Y.Rompas  
Burhanuddin Kiyai

*Abstract : The research objective was to explain in village development. In Hatetabako Village, Wasile sub-district, Central East Halmahera District. This study used a descriptive and repressive. Village secretary, head of BPD member (BPD), Community.data Collections uses interview guidelines, Documentation study observations while analysis techniques are carried out through the stages of data collection in development in the village of hatetabako Wasile SUB-District, central East Halmahera Regency, it was observed that the two criteria, namely preventive and repressive, had not been maximally implemented. The village level needs to be improved through community participation in village development. Community involvement in community participation in development is increased so that there are no misunderstandings between the village government and the community, others are regulated in government regulation number 124 of 2001 concerning community participation in development villages, and the 2004 6 year law on villages, should be optimized*

*Key words: Community participation in village development*

## **PENDAHULUAN**

Strategi pembangunan yang terlalu sentralistik merupakan contoh ketidakpastian birokrasi masa lalu terhadap variasi pembangunan masyarakat lokal dan kurang tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan akan masyarakat di tingkat desa. Hal ini menyebabkan partisipasi dan spirit masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal tidak dapat berkembang dengan wajar. Partisipasi memang telah lama menjadi penghias bibir para pejabat dari tingkat pusat sampai tingkat desa bahwa pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil bila tidak didukung dengan “partisipasi masyarakat”.

Namun konsep partisipasi masyarakat yang digunakan oleh para pejabat jauh berbeda dengan konsep partisipasi yang sebenarnya. Partisipasi masyarakat menurut pejabat hanya ditekankan dalam hal pembayaran pajak, maka pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tidak sesuai dengan konsep partisipasi yang sebenarnya. Penerapan teknologi yang diperkenalkan atau mengkonsumsi

produk dalam negeri serta kontribusi materi yang berupa tanah, batu, semen, dan lain-lain. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Pembangunan nasional merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Hal tersebut bahwa “Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”. Pembangunan nasional pada dasarnya ialah pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan masyarakat seutuhnya, pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi-

potensi yang dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia yaitu potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Melalui program-program peningkatan potensi sumber daya yang dimiliki maka tujuan bangsa Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara akan dapat dicapai. Berdasar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan nasional dapat dimulai dari pembangunan masyarakat desa. Program pembangunan masyarakat desa merupakan program berupa proses pembangunan di mana masyarakat desa berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Hal tersebut sesuai tujuan dari program pemberdayaan masyarakat. Faktor penentu tercapainya tujuan Pemberdayaan masyarakat ialah ada tidaknya partisipasi masyarakat dalam program implementasi dari pemerintah tentang

Terdapat beberapa alasan perlunya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan hal itu dikarenakan masyarakatlah yang menjadi sasaran utama sebagai penggerak, pengelola, pengguna hasil dari pemberdayaan tersebut. Adanya partisipasi masyarakat diharapkan program pembangunan lebih terarah sehingga rencana atau program pembangunan yang disusun tersebut sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat Desa Hatetabako, dalam program pembangunan masyarakat tersebut dapat diikuti oleh semua warga tetapi banyak dari masyarakat yang kurang terlibat dalam hal tersebut yaitu partisipasi masyarakat, di karenakan sebagian masyarakat hanya mementingkan kepentingan masing-masing sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak terlibat dalam partisipasi untuk program pemerintah Desa dalam pembangunan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan tentang pentingnya suatu partisipasi dalam suatu program, maka peneliti akan melakukan penelitian

tentang "Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan Desa untuk Pemberdayaan masyarakat Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian tentang Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan sudah pernah dilakukan sebelumnya peneliti terdahulu. Penulis mencoba merujuk beberapa hasil penelitian tersebut. Pertama, Hasil penelitian skripsi yang ditulis Muh.Firyal Akbar tentang Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Jati mulya Kabupaten Boolemo

### **Konsep Partisipasi**

UU No 6 tahun 2014 pasal 68 ayat 2e bahwa "Masyarakat wajib berpartisipasi dalam semua kegiatan desa. Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli. , di bawah ini saya akan memaparkan tentang Definisi Partisipasi, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli. Semoga bagi kalian yang sedang membutuhkan artikel ini untuk sebagai syarat melengkapi tugas sekolah, kuliah bahkan untuk tugas akhir/ skripsi agar dapat bermanfaat. Berikut ini adalah penjelasannya.

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata "participation" yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. kaitkan dengan peran serta.

Berdasarkan pendapat tersebut, partisipasi tidak hanya berupa keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan, tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga timbul tanggung jawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompok. Dengan kata lain, partisipasi berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi berfungsi sebagai suatu kemitraan (*partnership*) dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila saling percaya dan saling pengertian antara perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat dapat dihidupkan. Kondisi yang saling percaya dan saling pengertian tidak tumbuh begitu saja, tetapi harus terdapat pandangan saling menolong, saling percaya, dan jujur antara aparat dengan masyarakat.

Masyarakat adalah kelompok manusia yang dapat bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas tertentu.

masyarakat yang telah mengalami kemajuan atau tersentuh oleh pengaruh modernisasi harus mewaspadaikan arus globalisasi yang dapat mempengaruhi secara positif dan negatif keadaan mental fisik, bahkan spiritual masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat tumbuh, baik dengan sendirinya maupun disebabkan oleh faktor lain.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :  
Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli

a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara

kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.

b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.

c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.

d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Pendapat Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara

aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

- Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukkan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005:16 ) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat.

Baca juga Definisi Pembangunan Fisik Dan Pembangunan Non Fisik Partisipasi dalam

memerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, perlibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa.

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli

-Hetifah (dalam Handayani 2006:39) berpendapat, "Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal".

Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) "Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga

menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”.

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Selanjutnya menurut Slamet ( 2003:8 ) menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

1. Partisipasi politik (political participation)
2. Partisipasi social (social participation)
3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship)

1. Partisipasi politik (political participation) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi social (social participation) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi.

Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata.

Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga.

Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah.

Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh

masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan.

Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

### **Konsep Pembangunan Desa**

Menurut S.P Siagian (2012 :2) Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang di lakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa/*nationbuilding*. Lebih lanjut Bintoro (2010:59) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan proses tanpa akhir, suatu kontinuitas perjuangan mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah. Berarti jelasnya bahwa suatu pembangunan tidak lain merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berencana dan dilaksanakan secara sadar.
- b. Selalu di arahkan pada usaha peningkatan atau menuju kepada keadaan yang lebih baik.
- c. Berlangsung terus-menerus

Sukirno (2009: 13) Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan

ialah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Fakih (2011:10) Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.

Trijono(2007:3)Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

Menurut Effendi (2007: 2) Menurutnya pembangunan ialah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membukawawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Agus Suryono (2010: 132) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Adapun pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti yang dimaksud berupa:

- a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dan lain-lain.
- b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.

- c. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas.

- d. Prasarana produksi saluran air.

Bambang T. Soemantri (2011), BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan di samping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam aturam perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia adalah sebuah badan organisasi pemerintah yang berada di dalam struktur pemerintahan desa dan bersama aparatur pemerintahan desa adalah sebagai penyelenggara pemerintahan di desa.

Adapun kewajiban tentang keanggotaan BPD yang diatur dalam PP RI 72 Tahun 2005 pasal 37, sebagai berikut:

- a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan kepala desa ( membentuk panitia pemilihan kepala desa, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk mengesahkan Kepala Desa terpilih);

- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Untuk meningkatkan tugas dan fungsi BPD itu sendiri terhadap kewajiban dalam

Mensosialisasikan peraturan desa maka ada langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan:

1. Melaksanakan rekrutmen politik dari anggota BPD dengan lebih baik.
2. BPD setidaknya dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik.
3. Dalam kubu BPD harus dapat bekerja sama dengan baik.

Adapun putusan Bupati Halmahera Utara dalam menetapkan tugas dari

Badan Permusyawaratan Desa ada 5 ( lima) antara lain:

Kesatu: Mengesahkan pengangkatan anggota BPD desa Hatetabakodi Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Kedua :Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dengan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pembentukan kepala desa
- e. Menggali, dan menampung, menghimpun merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

f. Menyusun tata tertib BPD.

Ketiga : Masa bakti anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) adalah enam tahun dihitung tanggal pelantikan.

Keempat:Memerintahkan pemerintah Desa untuk melaksanakan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Hatetabako

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di tinjau dan di perbaiki sebagaimana mestinya.

#### Kerangka Pikir

Dari beberapa jenis karya ilmiah diatas yang paling dianggap menjadi cobaan terberat bagi mahasiswa adalah penulisan skripsi. Dalam skripsi terdapat bab-bab yang didalamnya berisi penjelasan maupun hasil penelitian. Salah satu bab dalam skripsi adalah Bab II yang diberi judul “Landasan Teori atau Tinjauan Pustaka”.

Landasan Teori sangat penting dalam sebuah penelitian terutama dalam penulisan skripsi peneliti tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin di temui di tempat penelitian jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya. Dalam skripsi landasan teori layaknya fondasi pada sebuah bangunan. Bangunan akan terlihat kokoh bila fondasinya kuat, begitu pula dengan penulisan skripsi, tanpa landasan teori penelitian dan metode yang digunakan tidak akan berjalan lancar. Peneliti juga tidak bisa membuat pengukuran atau tidak memiliki standar alat ukur jika tidak ada landasan teori. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012:52), bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Teori adalah serangkaian asumsi,

konsep, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Menurut Jonathan Turner (dalam babbie,1992) menyatakan bahwa teori dalam ilmu sosial adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati, yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia. Berdasarkan beberapa pengertian diatas secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualitas antara asumsi, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena yang diperoleh melalui proses sistematis, dan harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak maka itu bukan teori. Teori semacam ini mempunyai dasar empiris, dimana harus melalui proses eksperimen, penelitian atau observasi, sehingga teori dapat dikatakan berhasil. Adapun pengertian dari Asumsi, konsep ,konstruk dan proposisi dalam sebuah teori (menurut Djojuroto kinayati & M.L.A Sumayati:2004) adalah sebagai berikut:

Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.

Konsep adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide ( gagasan ) tertentu.

Deskripsi teori adalah suatu rangkaian penjelasan yang mengungkapkan suatu fenomena atau realitas tertentu yang dirangkum menjadi suatu konsep gagasan, pandangan, sikap dan atau cara-cara yang pada dasarnya menguraikan nilai-nilai serta maksud dan tujuan tertentu yang teraktualisasi dalam proses hubungan

situasional, hubungan kondisional, atau hubungan fungsional di antara hal-hal yang terekam dari fenomena atau realitas tertentu. Dengan menyelam jauh ke dalam deskripsi teori, akan diketahui kekuatan dan kelemahan suatu teori.

Dalam suatu penelitian, deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah teori yang perlu dikemukakan/dideskripsikan, akan tergantung pada luasnya permasalahan dan jumlah variabel yang diteliti.

Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Teori yang dideskripsikan dalam proposal maupun laporan penelitian dapat digunakan sebagai indikator apakah peneliti menguasai teori dan konteks yang diteliti atau tidak.

Berikut langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori adalah:

Tetapkan nama variabel yang diteliti, dan jumlah variabelnya. Mencari sumber-sumber bacaan (buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi) yang sebanyak-banyaknya dan relevan

Lihatlah daftar isi setiap buku, dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan diadakan. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan yaitu 1. Orang Kepala Desa, 1. Orang Sekertaris Desa, 5. Orang Masyarakat Desa 3. BPD. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara,observasi/dokumentasi. Dan teknik analisa data menggunakan, kategori data, reduksi data, interpretasi data, penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskriptif Hasi Wawancara**

Sebagaimana telah disebut dalam uraian /diteliti adalah untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu didefenisikan sebagai keberhasilan pemerintah dalam membangun desa dalam mencapai tujuan dan saran pemerintah desa yang telah ditetapkan yaitu partisipasi masyarakat dalam membangun desa diamati dari dua kriteria yaitu preventif, represif.

### **Kewenangan**

Dalam pelaksanaannya pemerintah desa bertugas meyenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut informan, kepala desa, dengan pendidikan terakhir SMA, usia 47 tahun, Menyatakan bahwa: “secara umum masyarakat desa hatetabako sangat menyadari betapa penting partisipasinya sebagai agen perubahan untuk dapat membantu pemerintah desa terlebih khusus dalam pembangunan desa, karena di satusisi mereka adalah pejuang bagi desa guna menunjang perkembangan danpembangunan desa. Secara garis besar kewenangan dari pemerintah desa telah berjalan dengan baik, pemerintah desa melalui program yang sudah ditetapkan dalam musyawarah rencana

pembangunan desa maupun rencana pembangunan jangkah menengah desa telah semaksimal mungkin menjalankan amanah yang telah dipercayakan dalam melaksanakan pembangunan desa.

### **Tanggung Jawab**

Dalam kegiatan pembangunan desa, untuk menunjang keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah desa saja tetapi juga

merupakan tanggung jawab dari masyarakat. Menurut informan, sekretaris desa dengan pendidikan terakhir SMA, usia 51 tahun,mengatakan bahwa: “peran dan partisipasi masyarakat di desa lesabe sejauh inisangat loyal terhadap setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa. karena selain pemerintah desa setiap aktifitas yang dilaksanan turut melibatkan setiap lapisan masyarakat. Secara garis besar, pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah desa maupun masyarakat, pemerintah tidak dapat bekerja tanpa bantuan dan keterlibatan masyarakat, begitu juga masyarakat membutuhkan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

### **Manfaat**

Setiap kegiatan pembangunan desa, diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, Menurut informan ,BPD dengan pendidikan terakhir SMA, usia 54 tahun, menyatakan bahwa: “partisipasi masyarakat desa lesabe terhadap pembangunandesat terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yangberpartisipasi atas keinginannya sendiri dan kelompok yang kedua adalah kelompokyang berpartisipasi tapi mengharapakan upah kerja. Secara garis besar, bahwa manfaat dari pembangunan adalah untuk semua masyarakat tanpa memandang status, jabatan, golongan, umur dan lain sebagainya, karena pada hakekatnya

manfaat dari pembangunan desa adalah untuk kepentingan bersama.

### **Tingkat Partisipasi**

dalam Pembangunan Desa Hatetabako Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Menurut informan, seorang warga desa hatetabako yang mengatakan bahwa:Melihat bentuk partisipasi yang dikemukakan di atas, bagi masyarakat desa hatetabako dengan corak kehidupannya untuk mencapai sukses pembangunan hendaknya lebih mengetahui kemampuan dan keadaan nyata dengan memperhatikan aspek-aspek pokok yang berkaitan dengan pembangunan. "...tidak semua program pembangunan yang ada bisa terlaksana di Desa hatetabako, pembangunan dikecamatan wasile tengahtetap meperhatikan kondisi masyarakat, lingkungan, dan manfaat dari pembangunan yang akan di laksanakan, selain itu tidak semua pembangunan yang ada, kita "Masyarakat' bisa berpartisipasi aktif, karena memang harus melihat apakah pembangunan di tujukan untuk kami atau tidak."

### **Partisipasi Non Fisik (Ide-Ide / Pemikiran)**

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan suatu masyarakat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Idealnya suatu merupakan luaran dan partisipasi mesyarakat yaitu usaha untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga proses pembangunan dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan itu dapat dirasakan secara adil dan sejahtera.

Menurut Pemerintah Desa Hatetabako, (wawancara tanggal 30 Desember 2018) yang mengatakan bahwa: "...kami sering mengundang masyarakat jika ada pembangunan yang akan di laksanakan tapi terkadang yang datang hanya itu itu saja, yaitu orang-orang yang bisa bicara, dan orang-orang yang kurang aktif itu biasanya terkendala, karena mereka hanya datang dan mendengarkan. Tapi mereka biasa aktif jika pelaksanaan pembangunan di lapangan..".

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya hasil penelitian dan pembahasan, dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sesuai dengan fokus penelitian maka penulis menarik kesimpulan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur:

1. Dalam pembangunan desa tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh satu komponen saja.
2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, secara umum partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.
4. Setiap pembangunan di desa harus melibatkan masyarakat mulai dari proses pembahasan program pembangunan sampai dengan evaluasi, sebab yang harus menerima manfaat dari setiap pembangunan di desa adalah semua masyarakat.

*komunitas dari pemikiran menuju penerapan.* Depok: FISIP UI Press.

### **Saran**

Masyarakat Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Wasile perlu merubah paradigma dan lebih menyadari bahwa begitu pentingnya partisipasi dalam setiap proses pembangunan desa guna keberhasilan pembangunan, oleh karena itu saran dari penulis:

1. Diharapkan masyarakat dapat merubah kerangkah berpikir untuk lebih meningkatkan partisipasi khususnya dalam setiap pembangunan guna menunjang setiap program pemerintah desa yang sudah ditetapkan.
2. Diharapkan masyarakat dapat lebih menyadari betapa pentingnya partisipasi dalam pembangunan di desa.
3. Diharapkan pemerintah desa dapat membangun proses kesadaran kepada sebagian masyarakat yang tidak mau terlibat dalam proses pembangunan sehingga ikut terlibat atau menjadi aktif berpartisipasi dalam setiap pembangunan desa, melalui sosialisasi kepada masyarakat.
4. Masyarakat harus memegang prinsip bahwa sebagai makhluk sosial, tidak pernah terlepas dari yang namanya hidup saling membutuhkan karena keterbatasan bukan menjadi suatu batasan dalam bernasyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan partisipatoris berbasis aset*

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu,.

Anwas, M Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabata.

Bungin, B. M. 2010, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Kencana

Efendy, Onong Uchana. 2005. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Effendy, Onong, Uchjana. 1984. *Ilmu, Teori dan Praktek Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Fisher, Aubrey, 1990. *Teori-teori dan Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Fakih (2011:10) Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral.

Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Djambata.

Moleong, L. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Redoskarya.

Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. 2000. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Akasara.

Rohidi, R dan Mulyarto, T. 2000. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

Sumodiningrat, Gunawan. (1999) *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*. Yogyakarta, Ghalia Indonesia

Sukirno (2009: 13) pengertian ekonomi murni, pembangunan ialah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat

Siagian P, Sondang. 2000. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara.

W.F Connel. 1972. *Masalah Individu Keluarga dan Masyarakat*. Bandung: Remaja Redoskarya.

**Sumber Lain :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No 6 tahun 2014 pasal 68 ayat 2e bahwa “masyarakat wajib berpartisipasi dalam semua kegiatan desa.